

# PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI DALAM RANGKA MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

Ivando Holawarno

NPP. 29.0548

*Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung*

*Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: ivandoholawarno@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The increasing number of the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) requires special attention from the Government and the public. The city of Bandar Lampung, Lampung Province itself, cannot be separated from the impact of the spread of the Corona Virus. **Purpose** This internship aims to find out how the distribution of social assistance can improve public compliance with the importance of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Health Protocol in Bandar Lampung City, Lampung Province. Therefore, this Final Report is entitled "DISTRIBUTION OF SOCIAL ASSISTANCE DURING PANDEMIC TIMES IN COMPLIANCE WITH THE HEALTH PROTOCOL IN BANDAR LAMPUNG CITY, LAMPUNG PROVINCE".

The research **method** used by the writer in this internship activity is a qualitative research method with an inductive approach. The Data collecting techniques used were interviews and documentation. In analyzing data, the writer uses analysis techniques with the steps of analysis, which is data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Based on **Result**, it can be seen that the implementation of the distribution of social assistance is quite good, while the impression from the community for this assistance is quite good. However, there are still factors that are problematic in efforts to increase compliance with the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Health Protocol, including economic factors, namely the amount of assistance, distribution of aid and limited government budget.

At the end of this report, **Conclusion** the author gives advice to the Bandar Lampung City Government in order to plan the budget well so that the problem of the amount of aid and the distribution of aid can be overcome for the next, so that the community can implement and comply with implementing the Health Protocol in each of their activities properly and correctly.

**Keywords:** *Distribution of Social Assistance, Community Compliance, Health Protocol*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Angka penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang terus meningkat membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah serta masyarakat. Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sendiri yang tidak terlepas dari dampak penyebaran Virus Corona. **Tujuan** Magang kali ini untuk mengetahui bagaimana Pendistribusian Bantuan Sosial dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang pentingnya Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Oleh karena itu Laporan Akhir ini berjudul “PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI DALAM RANGKA MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG”.

**Metode** penelitian yang digunakan penulis pada kegiatan magang ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis data dengan langkah-langkah analisisnya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan **Hasil/Temuan:** dapat diketahui bahwa pelaksanaan distribusi bantuan sosial sudah cukup baik, sedangkan kesan dari masyarakat untuk bantuan ini sudah cukup baik. Walaupun demikian juga masih terdapat faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam upaya peningkatan kepatuhan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diantaranya adalah faktor ekonomi yaitu jumlah bantuan, pemerataan bantuan dan anggaran pemerintah yang terbatas.

Di akhir laporan ini, **Kesimpulan** penulis kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung agar dapat merencanakan anggaran dengan baik sehingga permasalahan jumlah bantuan dan pemerataan bantuan dapat diatasi untuk yang selanjutnya, agar masyarakat dapat melaksanakan dan mematuhi akan menerapkan Protokol Kesehatan disetiap aktivitas mereka dengan baik dan benar.

**Kata Kunci:** Distribusi Bantuan Sosial, Kepatuhan Masyarakat, Protokol Kesehatan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seluruh dunia dihebohkan dengan sebuah virus pada akhir tahun 2019 yang mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan. Hal ini Bermula di Kota Wuhan China saat ditemukannya wabah pneumonia yang tidak diketahui asalnya. Dinyatakan dari WHO, COVID-19 menjadi pandemi pada tanggal 13 maret 2020. Hingga sampai saat ini 25 agustus 2021 total kasus yang teridentifikasi sudah mencapai 213.926.467 (213 juta) kasus dengan pasien sembuh sebanyak 191.431.426 (191 juta) dan total kematian 4.463.465 jiwa<sup>1</sup>.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terinfeksi saluran pernapasan dari ringan hingga sedang seperti penyakit flu pada umumnya, kebanyakan orang yang terinfeksi virus ini terjadi setidaknya satu kali pada hidupnya. Kebanyakan virus corona dengan membuat penyebaran virus pada umumnya yakni melalui air liur antara manusia dan manusia seperti batuk atau bersin, bersentuhan dengan wajah orang ataupun tangan yang sudah terinfeksi, menyentuh anggota tubuh lainnya yang sudah terinfeksi, dan setelah menyentuh barang-barang yang sudah terkena air liur pengidap virus dan bisa juga melalui tinja atau feses.

---

<sup>1</sup> Worldmeter,2021



Berdasarkan laporan data terbaru pada tanggal 7 Agustus 2021 total kasus virus corona di Indonesia mencapai 3.639.616 orang dan bertambah 31.753 orang. Jumlah kasus virus corona terus bertambah setiap harinya dengan beberapa melaporkan kesembuhannya 3.036.194 orang dan meninggal mencapai 105.598 orang jumlah yang tidak sedikit. Usaha penanganan terus dilakukan seperti percepatan program vaksinasi dan pencegahan pembatasan masyarakat yang sudah diterapkan di Indonesia untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.<sup>2</sup>

Di Lampung sendiri penyebaran virus ini dimulai pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020 laki-laki 63 tahun tersebut mendatangi seminar di GPIB hotel aston Bogor dan pada 29 Februari 2020 pasien kembali ke Bandar Lampung. Dari kembali ini, pasien sudah merasakan gejala panas, makan minum susah ditelan, batuk-batuk, dan suhu mencapai 38 derajat celsius. Pasien yang pertama kali melaporkan adalah anaknya yang berumur 32 tahun. Dikarenakan khawatir pada saat terhadap informasi pada saat 14 maret 2020 dari perkumpulan seminar Lampung yang menghadiri di Bogor bahwa ada 1 orang yang meninggal dunia dengan diagnosa terinfeksi virus corona di Jawa timur. Serta ada informasi satu orang yang sedang melakukan perawatan di Jakarta dan melakukan kegiatan seminar yang sama dengan ayahanda pelapor. Dengan riwayat tersebut, dinas kesehatan Lampung melakukan tracking (pelacakan) pada setiap orang yang sudah melakukan kontak dengan pasien tersebut.

Dinas kesehatan provinsi Lampung menginformasikan update perkembangan kasus COVID-19 per Kamis, 12 Agustus 2021 dengan jumlah kasus konfirmasi positif corona di Lampung dan dijumlahkan secara akumulatif berjumlah 266 kasus. Untuk kasus kematian akibat terinfeksi virus corona hingga tanggal 1 Agustus 2021 terkonfirmasi sejumlah 28 kasus.<sup>3</sup>

Selain itu pemerintah pusat mengarahkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di daerahnya masing-masing untuk menurunkan penularan COVID-19 di masyarakat. Pemerintah sampai saat ini melakukan pembatasan-pembatasan untuk masyarakat.<sup>4</sup> Kebijakan pembatasan yang dilakukan pemerintah mengakibatkan banyak toko-toko bahkan usaha kecil sebagai penghasilan satu-satunya masyarakat tutup dan mengalami pendapatan yang sangat turun dikarenakan tidak ada pembeli yang

<sup>2</sup> <https://COVID19.go.id>

<sup>3</sup> <https://dinkes.lampungprov.go.id>

<sup>4</sup> Intruksi Gubernur Lampung Nomor 10 tahun 2021

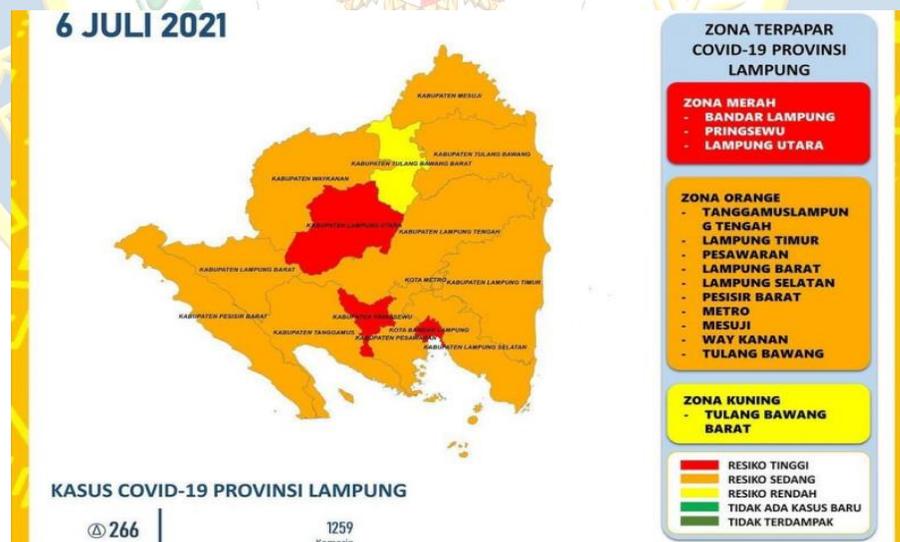
membeli di toko maupun di usaha kecil tersebut yang disebabkan oleh pembatasan masyarakat. Sehingga banyak dari masyarakat kehilangan pekerjaan atau pengangguran seperti banyaknya PHK yang dialami masyarakat.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi jadi permasalahan COVID-19 bukan hanya bersangkutan dengan pemberdayaan kesehatan melainkan ada kaitan sampingan dengan pemberdayaan ekonomi karena untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ada kaitannya dengan masalah ekonomi jadi tidak mungkin ekonomi meningkat apabila COVID-19 tidak dihilangkan dan dalam penelitian ini ialah memberikan daya kepada seseorang yang tidak berdaya akibat COVID-19 menjadi berdaya.

Sesuai program dalam mengatasi perlindungan dan pemulihan ekonomi yang terdampak COVID-19 ialah program bantuan untuk pelaku usaha yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan dari dampak COVID-19. Pentingnya upaya dan tindakan pencegahan mewajibkan semua orang harus mengikuti protokol kesehatan dan aturan pemerintah dalam menghentikan penyebaran virus corona. Upaya pemerintah agar masyarakat mau dan mengikuti aturan yang diberikan pemerintah dengan memberikan bantuan-bantuan sosial untuk membantu masyarakat menghadapi pembatasan-pembatasan yang diberikan. Hal ini dilakukan pemerintah agar masyarakat tetap taat dan mengikuti aturan-aturan yang diberikan pemerintah guna untuk dapat dikendalikan, sehingga jumlah yang terinfeksi corona menurun bahkan hilang.

Selain itu sesuai data kasus konfirmasi COVID-19 dan angka kasus kematian terus meningkat setiap bulannya dari bulan perbulan dan kasus covid menurut peta sebaran covid-19 di provinsi lampung, Kota Bandar Lampung merupakan salah satu zona merah yang ada di Povinsi lampung sehingga dapat disimpulkan Kota Bandar Lampung menyumbang angka konfirmasi COVID-19 dan angka kematian yang cukup banyak. Berikut adalah peta gambar penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung :<sup>5</sup>



<sup>5</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/2251338/kota-bandarlampung-masuk-zona-merah-penyebaran-covid-19>

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

#### **1.3.1 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Masker Dalam Pencegahan COVID-19 di Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar**

Penelitian ini penulis menggunakan *method* deskriptif kualitatif dengan menganalisa data terkait yang diterimanya, serta sampel penelitian berupa dengan pendekatan fenomenologi melalui teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi langsung selama terjadi masa pandemi covid-19.

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap masyarakat ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Beberapa diantaranya meyakini namun ada juga yang tidak meyakini tentang adanya COVID-19. Namun secara umum, dalam penerapannya masyarakat masih belum patuh terhadap kebijakan penggunaan masker padahal masker sudah sangat mudah dibeli.<sup>6</sup>

#### **1.3.2 Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerapan Social Distancing Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 DI Kota Langsa**

Penelitian ini penulis menggunakan *method* deskriptif kualitatif dengan menganalisa data terkait yang diterimanya, serta sampel penelitian berupa dengan pendekatan fenomenologi melalui teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi langsung selama terjadi masa pandemi covid-19. Tujuan penelitian untuk menulis skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penerapan sosial distancing COVID-19 dan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan sosial distancing COVID-19.

Kesimpulan penelitian tersebut memperoleh bahwa pandemi COVID-19 membuat masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan social berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronan Virus Disease 19. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah pelaksanaan penerapan social distancing masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi, seperti tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan social distancing yang dianjurkan oleh pemerintah dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak disiplin terhadap aturan-aturan yang telah dikeluarkan pemerintah. Banyak juga masyarakat yang menganggap COVID-19 itu tidak ada, adapun masyarakat juga meminta jawaban yang jelas dan pasti mengenai COVID-19 dengan bukti-bukti yang jelas karena tidak memercayainya.<sup>7</sup>

#### **1.3.3 Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat COVID-19**

Peneliti menulis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penentuan informan yang digunakan dengan teknik purposif sampling. Teknik pengumpulan data dan informasi dari informan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. peneliti bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap manfaat penyaluran bantuan.

---

<sup>6</sup> Andi Suci Lestari.S Alam, 2020, Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Masker Dalam Pencegahan COVID-19 Di Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar

<sup>7</sup> Raka Pratama, 2021, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerapan Social Distancing Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 DI Kota Langsa

Sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap bantuan tunai yang diberikan pemerintah merasa sangat terbantu untuk dipergunakan kebutuhan sehari-hari, berobat, dan membuat sebagai modal usaha.<sup>8</sup>

### **1.3.4 Penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi COVID-19**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yang menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis.

Berdasarkan kesimpulan penulis bahwa yang pertama penyalahgunaan bantuan langsung tunai pada masa pandemic COVID-19 memiliki karakteristik berupa pendataan yang tidak tepat dan didalamnya melibatkan beberapa elemen masyarakat. Kedua terdapat beberapa cara penyelesaian yuridis dalam penyalahgunaan bantuan langsung tunai pada masa pandemi COVID-19.<sup>9</sup>

## **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian yang dilakukan saat ini oleh penulis berjudul “Pendistribusian Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Dalam Rangka Mematuhi Protokol Kesehatan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung”. Penelitian yang dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana distribusi bantuan dari pemerintah kepada masyarakat dan menganalisa bagaimana masyarakat setelah mendapatkan bantuan untuk protokol kesehatan. Penelitian dilakukan menggunakan *metode* deskriptif kualitatif. Dengan hal metode tersebut untuk mendapatkannya penulis melakukan dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan penglihatan hasil penelitian terdahulu di atas terlihat bahwa kajian yang dilakukan penulis terdahulu belum menyentuh pada kajian pelayanan pemerintah terhadap distribusi bantuan yang akan diberikan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan khususnya belum ada yang menggunakan lokus penelitian ini di Kota Bandar Lampung

## **1.5. Tujuan.**

Penulis ini memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penelitiannya, ialah:

1. Untuk mengetahui sebab dan alasan yang mendorong mengapa masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah
2. Untuk mengetahui ada atau tidak distribusi bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Kota Bandar Lampung
3. Untuk mengetahui kesan apa yang diberikan masyarakat dengan distribusi bantuan sosial yang diberikan pemerintah

---

<sup>8</sup> Nur Azizah Mayasari, 2020, Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat COVID-19

<sup>9</sup> Rachmad Yunus Indrayanto, 2020, Penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi COVID-19

## II. METODE

Pendekatan penelitian ialah suatu pendekatan untuk mendapatkan informasi dan data dari lapangan atau daerah eksplorasi untuk menjawab pertanyaan dari isu-isu yang harus dijelaskan. Spesialis memainkan peran penting dalam kemajuan informasi, minat yang muncul dari persepsi untuk mendapatkan kenyataan yang dilakukan secara efisien dalam waktu tertentu dengan teknik yang sesuai pedoman yang tepat. Untuk mengurus suatu masalah, penelitian harus dilakukan dengan hati-hati agar penelitian dalam memperoleh data tidak merugikan pihak tertentu. Pendekatan penelitian dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitiannya sehingga dalam pelaksanaannya penulis memiliki arah dan tujuan dari penelitiannya tersebut, arah dan tujuan tersebut telah disusun oleh penulis dan teori-teori yang menjadi acuan.

Menurut Creswell, Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang penelitiannya tersebut sangat membutuhkan sebuah informasi dari objek atau ruang lingkup yang luas, pertanyaan bersifat umum, pengumpulan data berupa kata-kata dari sumber, dan menjelaskan kata-kata tersebut dan melakukan penelitian subyektif<sup>10</sup>. Berdasarkan pandangan ahli diatas, penulis menggunakan pendekatan penelitian *metodh* kualitatif menurut Creswell yang menjelaskan penulis sebagai peran utama dalam mencari dan mengelola informasi atau data yang berupa teks/kata-kata dari sumber.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Penulis mengambil informan dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial, serta Masyarakat yang mendapatkan bantuan sebanyak 20 orang yaitu perwakilan dari masing-masing kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung karena mereka yang merasakan sebelum dan sesudah menerima bantuan yang terjadi di lapangan serta mampu memberikan data dan informasi terkait penelitian ini dengan teknis realita di Lapangan. Operasionalisasi konsep penulis menurut teori sedarmayanti (2014) dan teori Prof. Dr. B Arief Sidharta, SH (2000) terkait manajemen distribusi bantuan dan kepatuhan terhadap hukum, yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggung Jawaban<sup>11</sup> dan Keptuhan Orang Karena Pengaruh Orang Lain, Kepatuhan Orang Karena Ada Yang Mendorong.<sup>12</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis dalam menganalisis penelitiannya saat di lapangan menggunakan teori menurut ahli Sedarmayanti dan Prof. B Arief Sidharta, pada teori tersebut menyatakan indikator untuk mengukur distribusi bantuan dan kepatuhan akan protokol kesehatan, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggung Jawaban dan Keptuhan Orang Karena Pengaruh Orang Lain, Kepatuhan Orang Karena Ada Yang Mendorong. Berikut pembahasan dari hasil pengukuran indikator yang digunakan pada penelitian:

---

<sup>10</sup> J W Creswell and T C Guetterman, 2019. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (Pearson)

<sup>11</sup> Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd, APU, 2014. *Manajemen Strategi*

<sup>12</sup> Prof. Dr. B Arief Sidharta, SH, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*

### 3.1 Yang Mendorong Masyarakat Tidak Mau Mematuhi Protokol Kesehatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 Tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19) menjelaskan pencegahan dan pengendalian untuk corona virus disease 2019 (COVID-19) agar tidak tersebar dengan melakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan tidak berpergian keluar rumah.<sup>13</sup> Maka dari sesuai dengan keputusan menteri kesehatan diatas seharusnya masyarakat mau untuk mematuhi protokol kesehatan agar tidak memperburuk pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia ini demi kesehatan bersama.

Tetapi alasan mengapa masyarakat tidak mau mematuhi protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah ialah karena masyarakat mengalami penurunan kesejahteraan sosial yang dimana meningkatnya angka kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah tersebut. Banyak dari masyarakat Kota Bandar Lampung yang kehilangan pekerjaan akibat peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti meningkatnya angka pengangguran dan kebangkrutan usaha yang disebabkan oleh peraturan PPKM di Kota Bandar Lampung yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan Intruksi Gubernur Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Virus Corona Disease COVID-19 di Provinsi Lampung yang berisikan pembatasan-pembatasan kegiatan pada masyarakat.

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	562 277	93,04	9,04
2019	588 177	91,24	8,71
2020	634 743	93,74	8,81

Dapat disimpulkan kembali pada tahun 2018 COVID-19 belum menjadi pandemi didunia seperti sekarang ini tetapi pada akhir tahun 2019 COVID-19 sudah menjadi pandemi didunia ini sehingga angka kemiskinan sudah mulai menurun dan pada tahun 2020 yang merupakan puncak-puncak COVID-19 di Indonesia maupun Kota Bandar Lampung sudah mengakibatkan angka kemiskinan sangat melonjak naik yang disebabkan oleh COVID-19. Sehingga masyarakat Kota Bandar Lampung mengalami puncak dari angka kemiskinan dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>14</sup> Adapun Indeks kemiskinan di Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut :

<sup>13</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020

<sup>14</sup> BPS Kota Bandar Lampung, 2021

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
Year	Poverty Gap Index	Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2018	1,38	0,36
2019	1,49	0,38
2020	1,61	0,45

Disimpulkan selisih perbandingan antara 2018-2020 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya yang berarti COVID-19 yang awalnya sudah masuk pada tahun 2019 sudah mengalami peningkatan dan pada saat puncak dari COVID-19 pada tahun 2020 mengalami peningkatan selisih yang lebih jauh dibandingkan pada tahun 2019. Selisih pada tahun 2020 dengan 2019 mencapai indeks kedalaman kemiskinan 0,12 dan indeks keparahan kemiskinan 0,07.<sup>15</sup>

### 3.1.1. Orang Mematuhi Karena Pengaruh Orang Lain

Pada saat melakukan penelitian dengan berladaskan dimensi dari keaptuhan karena ada dorongan dari orang lain berikut adalah jawaban untuk salah satu indikator dari dimensi tersebut yaitu apakah masyarakat akan terdorong setelah menerima bantuan. Setelah saya melakukan wawancara langsung kepada 3 masyarakat Kota Bandar Lampung pada tanggal 9-14 januari 2021 yaitu terdiri dari pedagang, pengangguran (PHK Karyawan), dan buruh cuci.

disimpulkan dari indikator ini akankah masyarakat akan terdorong untuk mematuhi protoktol kesehatan apabila adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah jawabannya adalah masyarakat sendiri mau untuk mematuhi protokol kesehatan. Dengan alasan pemerintah harus membantu dengan bersama-sama untuk mengatasi permasalahan faktor ekonomi dari COVID-19. Dalam hal ini seperti data dari informan diatas terjadinya PHK karyawan, tidak ada yang memanggil untuk memberikan pekerjaan, sedikitnya pembeli yang dialami oleh pedagang sehingga masyarakat itu tidak bisa untuk mengikuti aturan pemerintah. Akibat apabila masyarakat tidak menerima bantuan dan mengikuti aturan yang ada maka masyarakat yang sudah miskin akan mengalami kemiskinan yang sangat dalam karena tidak ada pendapatan.

Dengan dari itu masyarakat akan mau untuk mematuhi protokol kesehatan karena sesungguhnya masyarakat akan menerima semua peraturan apabila masyarakat tersebut dapat menghidupi kehidupannya sehari-hari dengan memenuhi kebutuhan pangan, pakan dan papan selama pandemi COVID-19.<sup>16</sup>

### 3.2 Upaya Pendistribusian Bantuan Sosial Yang Dijanjikan Pemerintah Kepada Masyarakat

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Indonesia Nomor 161/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial dalam penanganan dampak pandemic corona virus disease 2019 (COVID-19) tahun

<sup>15</sup> BPS Kota Bandar Lampung, 2021

<sup>16</sup> Masyarakat Kota Bandar Lampung

2021 menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan sosial dalam menangani dampak pandemi COVID-19 dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan wilayahnya masing-masing.<sup>17</sup>

### 3.2.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu dimensi yang terdapat 6 indikator yaitu sebagai berikut : jumlah bantuan, jenis bantuan, fasilitas yang digunakan, kriteria penerima bantuan, anggaran program bantuan, rencana jadwal/waktu.

Jenis Bantuan menurut Jawaban dari kepala dinas sosial Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial melakukan pengadaan beras premium yang akan diberikan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung yang terdampak COVID-19 untuk dapat membantu korban dari bencana COVID-19.

Dapat disimpulkan untuk menjawab indikator fasilitas barang yang digunakan menurut yang diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung fasilitas barang yang digunakan dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat tidak menggunakan fasilitas dari Dinas Sosial tetapi dengan bekerja sama dengan PT Bulok wilayah Kota Bandar Lampung. Fasilitas yang digunakan dikerahkan oleh PT Bulok dengan menggunakan 8 unit truk secara bergantian dan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya setelah sampai dikecamatan lalu menggunakan fasilitas yang dikerahkan dari setiap kecamatan yang selanjutnya diantarkan kelurahan masing-masing dan kelurahan yang langsung memberikan kepada masyarakat.

Sesuai dengan perkataan kepala dinas sosial kota Bandar Lampung dapat disimpulkan dari indikator kriteria penerima bantuan yang akan menerima bantuan, kriteria penerima bantuan terlebih dahulu difokuskan kepada warga miskin yang membutuhkan akibat dampak dari COVID-19. Dengan masing-masing kelurahan memilih warganya yang pantas untuk menerima bantuan. Surat keputusan walikota yang mengatur masyarakat yang pantas menerima bantuan terdapat pada surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 621/III.05/HK/2021 tentang penetapan daftar nama penerima bantuan beras kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kota Bandar Lampung tahun 2021.<sup>18</sup>

Berdasarkan ungkapan dari kepala bidang bantuan dan jaminan sosial diatas dapat disimpulkan untuk menjawab dari indikator jumlah bantuan berupa beras 5 Kg beras premium. Dengan tahap pertama 13.888 kepala keluarga dengan total beras berjumlah 69.440 Kg beras premium. Kemudian dengan tahap kedua 23.146 kepala keluarga dengan total 115.680 Kg beras premium. Jadi dengan total dari tahap pertama dan tahap kedua berjumlah 185.120 Kg beras premium yang dibagikan pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Bandar Lampung kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung.

Dapat disimpulkan dari indikator anggaran bantuan menurut yang disampaikan kepala bidang bantuan dan jaminan sosial anggaran yang digunakan dalam distribusi bantuan menggunakan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah atau Dana Insentif Daerah (DID). Anggaran yang digunakan pada tahap pertama bertotal 749.952.000 Rp dan tahap kedua 1.294.344.000 Rp dengan total dari tahap pertama dan tahap kedua berjumlah 1.999.296.000 Rp anggaran yang digunakan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Keputusan Menteri Sosial Indonesia Nomor 161/HUK/2020

<sup>18</sup> Sahriwansah, SE. Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

<sup>19</sup> Fery Hartawijaya,.Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Untuk perencanaan dari indikator jadwal dan waktu pelaksanaan sesuai dokumen surat perintah tugas kepala sekretariat satuan tugas penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung Nomor 380/9884/IV.06/XII/2021 dibuat tanggal 2 desember yang akan dilaksanakan pada bulan desember yaitu pada tahap pertama tanggal 9 desember 2021 dengan kecamatan panjang dan bumi waras dan 10 desember 2021 dengan kecamatan teluk betung timur dan teluk betung selatan. Sedangkan tahap kedua dilakukan pada tanggal 15-18 desember 2021 dengan 16 kecamatan selain dari 4 kecamatan yang sudah di tahap pertama.<sup>20</sup>

### 3.2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan dari indikator pelaksanaan program bantuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai satuan tugas COVID-19 wilayah kota Bandar Lampung dan dibantu oleh camat di wilayah Kota Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan distribusi bantuan sosial terdapat mekanisme standard operasional dan prosedur (SOP) yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dengan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kota Bandar Lampung

Dalam mekanisme Standar Operasional dan Prosedur Dalam mekanisme Standar Operasional dan Prosedur diatas dapat menjawab indikator bagaimana pelaksanaan kegiatan distribusi bantuan sosial pemerintah Kota Bandar Lampung dengan sasarannya yaitu keluarga tidak mampu/miskin dan dikumpulkan data keluarga yang membutuhkan kepada kelurahan kemudian di rekapitulasi oleh kecamatan kemudian diserahkan keluarga nya kepada dinas sosial lalu dibuatkan surat keputusan (SK) oleh walikota dengan keluarga yang akan menerima bantuan. Selanjutnya, dinas sosial melakukan pengadaan barang/jasa dalam jangka waktu 7 hari melalui surat pesanan dan kewajaran harga dari penyediaan dengan PT Bulok. Kemudian diterima oleh KPK kemudian diserahkan kepada kepala dinas sosial. Setelah kepada dinas sosial menerima bantuan beras kemudian diserahkan ke satuan gugus tugas di kecamatan lalu memberikan ke kelurahan masing-masing dan diserahkan kepada keluarga yang menerima bantuan. Agar tidak terjadi kecurangan maka kelurahan mengawasi warganya dengan mendata dokumentasi, KK, KTP kepada kecamatan kemudian diserahkan dokumentasinya kepada kepala dinas sosial Kota Bandar Lampung. Agar mekaniskme kegiatan menjadi terstruktur.

Dapat disimpulkan dari indikator pelaksanaan jadwal distribusi bantuan sudah terjalan sesuai dengan rencana dari 2 tahap dengan tanggal yang ditentukan di bulan desember 2021 dengan tidak mendapatkan kendala. Dimensi pelaksanaan dari indikator hambatan dalam pendistribusian bantuan dapat disimpulkan dalam melakukan pendistribusian bantuan ialah anggaran yang terbatas. Menurut beliau masih banyak masyarakat yang tidak mampu akibat dampak COVID-19 banyak yang belum mendapatkan bantuan dikarenakan anggaran yang kurang dalam pemerataan bantuan. Tetapi kepala bidang bantuan dan jaminan sosial berharap untuk dapat melakukan program bantuan kembali pada tahun 2022 walaupun belum dilaksanakan karena merupakan anggaran baru.<sup>21</sup>

### 3.2.3 Pengawasan

---

<sup>20</sup> Surat Perintah Tugas Sekretariat Satuan Tugas COVID-19 Kota Bandar Lampung Nomor 380/9884/IV.06/XII/2021

<sup>21</sup> Fery Hartawijaya, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dari indikator pemantauan dalam pemberian bantuan pengawasan dilakukan dengan bekerja sama dengan satuan tugas yang ada dikecamatan dan satuan tugas yang ada di kelurahan agar bantuan berjalan sesuai dengan rencana.<sup>22</sup> Dikatakan oleh Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dari indikator pemantauan langsung atau tidak langsung Dinas sosial sendiri walaupun dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan bekerja sama dalam mengadakan barang dan jasa beras dengan pihak kedua yaitu PT Bulok wilayah Kota Bandar Lampung tetapi tetap melakukan pemantauan langsung untuk kegiatan distribusi bantuan. Karena Dinas Sosial Kota Bandar Lampung juga merupakan termasuk dalam satuan tugas COVID-19 wilayah Kota Bandar Lampung bersama dengan satuan tugas kecamatan-kecamatan dalam pengawasan beras premium kepada masyarakat.<sup>23</sup>

### **3.2.4 Pertanggung Jawaban**

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan dan pelaksanaan secara langsung terhadap kegiatan distribusi. Dengan melakukan pengawasan langsung kepada masyarakat Kota Bandar Lampung agar sebagai perwakilan dari pemerintah Kota Bandar Lampung mewajibkan untuk bertanggung jawabnya atas program dari bantuan ini. Agar dalam program ini tidak terdapat kecurangan dan salah penggunaan yang dilakukan baik oleh salah satu oknum di kecamatan ataupun oknum yang ada di kelurahan. Sebab dari itu Dinas Sosial bertanggung jawab penuh untuk kelancaran pendistribusian Bantuan Sosial.

Dalam ketentuan yang sudah direncanakan dalam distribusi bantuan dapat disimpulkan bahwa kewajiban dari Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan pendataan Dokumentasi berupa foto beserta nama penerima, KK dan KTP dari masyarakat penerima bantuan. Agar masing-masing bertanggung jawab dalam penyerahan distribusi bantuan baik kelurahan yang memberikan data ke kecamatan dan kecamatan memberikan ke dinas sosial Kota Bandar Lampung. Agar ,menghindari kecurangan dalam penerimaan bantuan dan tidak disalah gunakan oleh pihak yang ingin melakukan kecurangan agar terjalannya kegiatan dari apa yang sudah direncanakan.<sup>24</sup>

## **3.3 Kesan Masyarakat Terhadap Bantuan Yang Diberikan Pemerintah**

### **3.3.1. Kepatuhan Karena Dorongan Orang Lain**

Kesan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan pemerintah telah mendapatkan respon yang cukup baik. Seperti yang sudah peneliti wawancarai kepada 20 masyarakat pada tanggal 9-14 januari 2021 dari masing-masing kecamatan yang menerima bantuan dan 1 kepala RT.

Anggapan beserta Kesan dari masyarakat dapat disimpulkan bahwa yang sudah peneliti dapat dalam terjun langsung ke masyarakat dengan mewawancarai masyarakat mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Banyak yang mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Bandar Lampung karena sudah mau mendengarkan curahan hati masyarakat dan melaksanakan distribusi bantuan. Selain berterima kasih menurut mereka untuk kualitas dari barang yang dibantu kepada mereka sangat bagus dan tidak ada keluhan, untuk sistem pengiriman bantuan masyarakat sangat tersanjung dengan kedatangan satuan tugas pemerintah untuk membagikan langsung di rumah-rumah masyarakat yang menerima bantuan. Kepala RT juga meberikan kesan yang baik dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah karena sudah

<sup>22</sup> Sahriwansah, SE. Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

<sup>23</sup> Fery Hartawijaya, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

<sup>24</sup> Elviran Yusna M, S.Sos. Kepala Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial

mau membantu warganya dalam menghadapi COVID-19. Beliau juga berharap akan ada bantuan kembali dari pemerintah karena masih belum meratanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Karena, masih banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan seperti PHK dari perusahaannya karena perusahaan karena banyak usaha yang mengalami kebangkrutan dan masyarakat tersebut kemudian tidak mendapatkan bantuan yang terkena dampak COVID-19.

Tetapi disamping jawaban dan respon yang baik masih terdapat pula masyarakat yang tidak mau untuk mematuhi protokol kesehatan menurut masyarakat tersebut dikarenakan jumlah bantuannya masih kurangnya untuk meringankan kehidupan keluarganya dengan dari itu masyarakat itu sendiri merasa harus terpaksa untuk melanggar aturannya untuk dapat bekerja dan menghidupi keseharian keluarganya. Menurut saya sebagai peneliti mewajarkan masyarakat tersebut masih harus bekerja karena bantuan yang diberikan ke masyarakat masih cuma berupa beras 5 Kg belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dari setiap perkeluarga.

Selanjutnya dari data yang ada terdapat pula kesan dari masyarakat yang merasa tidak adil dalam pendistribusian ini. Mengapa? Karena menurut informan mengatakan dilingkungan rumahnya masih ada masyarakat yang juga sangat membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan dan tidak masuk keluarga yang menerima bantuan dari kelurahan.<sup>25</sup>

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini memberikan penjelasan untuk bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang ditulis dalam tinjauan pustaka agar menghindari anggapan bahwa adanya kesamaan dalam penelitian yang merugikan pihak terkait dikemudian hari, berikut merupakan perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis lakukan:

Temuan utama dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, Hasil dari keutamaan penelitian ini ialah masyarakat mengalami kemiskinan yang signifikan dikarenakan COVID-19 yang mengagibatkan masyarakat tidak mau untuk mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Maka dari itu temuan utama yang peneliti dapatkan apabila pemerintah dapat membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dialami masyarakat berupa bantuan yang cukup yang diberikan. Maka dari itu masyarakat akan mau untuk mematuhi protokol kesehatan.

Sedangkan untuk penelitian sebelumnya mempunyai temuan utama yaitu : kepatuhan terhadap perturan masker, dan kesadaran hukum terhadap social distancing.

#### **1.1. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau untuk mematuhi protokol kesehatan dikarenakan faktor ekonomi. Dan maka dari itu temuan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu pemerintah membuat program bantuan untuk mengatasi faktor ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19

---

<sup>25</sup> Informan dari Masyarakat Kota Bandar Lampung

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis terkait pendistribusian bantuan sosial pada masa pandemi dalam rangka mematuhi protokol kesehatan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dapat disimpulkan bahwa :

Menurut yang peneliti simpulkan dari rumusan masalah ini informan masyarakat menjawab sebab dan alasan masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan dikarenakan dari faktor ekonomi yang menjelaskan bahwa masyarakat Kota Bandar Lampung mengalami keterpaksaan untuk tidak mengikuti protokol kesehatan karena harus memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut yang peneliti simpulkan berdasarkan wawancara dan dokumen di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk distribusi bantuan sudah berjalan dengan lancar dan sesuai yang direncanakan. Mengapa peneliti menyimpulkan cukup baik karena dalam pelaksanaan terdapat keluhan dari masyarakat yaitu masih banyak keluarga yang masuk kategori warga miskin yang terkena dampak COVID-19 masih belum mendapatkan bantuan dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sehingga membatasi dari Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk masyarakat yang menerima bantuan.

Kesan Masyarakat yang peneliti simpulkan dari data yang didapatkan peneliti dari informan masing-masing 20 kecamatan mengatakan terima kasih dan sangat senang kepada pemerintah sudah mendengarkan curahan hati atas distribusi bantuan ini karena dibalik dari bantuan ini baru berjalan di akhir tahun 2021 selama masa pandemi ini dan masyarakat kagum atas pemerintah walaupun dimasa ekonomi sedang menurun tetapi tetap untuk membantu masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung.

Dibalik kata terima kasih atas bantuan dari pemerintah kepada masyarakat tetapi terdapat kesan dan anggapan yang kurang baik atas distribusi bantuan ini yaitu masyarakat beranggapan dengan jumlah bantuan yang diberikan pemerintah yaitu beras 5 Kg tidak lah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada masa pandemi ini dan beranggapan masyarakat masih harus terpaksa untuk tidak mematuhi aturan protokol kesehatan dikarenakan masyarakat masih harus bekerja dengan beraktifitas untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu masyarakat beranggapan pemerintah kuranglah adil terhadap distribusi bantuan ini karena masih banyak warga Kota Bandar Lampung yang masuk kriteria warga miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan dan tidak di data kelurahan sebagai penerima bantuan dikarenakan anggaran yang terbatas sehingga penerima bantuan terbatas. Sehingga kesan dan anggapan masyarakat cukup memuaskan untuk yang menerima bantuan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis meyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program bantuan sosial untuk masyarakat

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang telah memberikan fasilitas sehingga rampungnya penelitian yang dilakukan, serta pihak terkait yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

## **A. Buku**

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmadi, Hamid. (2014) *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Daryanto. (2011). *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Satu Nusa
- Kusumaatja, Mochtar dan Arief Shidharta. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni Bandung.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian* . Bogor : Ghalia Indonesia
- Niven, N. (2008). *Psikologis Kesehatan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Purwosutjipto. (2007). *Pengertian Hukum Pokok Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Rustanto, Bambang. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bd Bandung : Alfabet.
- Santiago, Faisal. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Westriningsih. (2018). *Mengenal Kegiatan Distribusi*. Klaten: Cempaka Putih.
- Purwosutjipto. (2007). *Pengertian Hukum Pokok Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Santiago, Faisal. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sunyonto, Danang. (2016). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian*. Bandung: CV Alfa Beta.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Instruksi Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Lampung

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 510/IV.06/HK/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Bandar Lampung 2020

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42/IV.42/HK/2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang percepatan barang dan jasa pada masa pandemi COVID-19

#### **D. Sumber Lainnya**

<https://www.antaranews.com/berita/2251338/kota-bandarlampung-masuk-zona-merah-penyebaran-covid-19>

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/04/074500365/update-corona-4-agustus--lagi-indonesia-negara-dengan-penambahan-kematian?page=all>

<https://covid19.bandarlampungkota.go.id/statistik.html>

<https://dinkes.lampungprov.go.id/covid19/>

<https://covid19.lampungprov.go.id/>

<https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/2021/02/26/89c1b3d0038567aff884ca04/kota-bandarlampung-dalam-angka-2021.html>

<https://bandarlampungkota.bps.go.id>